



## **IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)**

(Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur)

### **Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-I)

Oleh:

**Abdullah Fakhil Hilmi Al Huda**

**NPM. 21901091030**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
MALANG 2023**

## ABSTRAK

Abdullah Fakhil Hilmi Al Huda, 2023, NPM 21901091030, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang), Dosen Pembimbing I: Dr.Sunarivanto, S,Sos.,M.M Dosen Pembimbing II: Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Malang, khususnya terkait dengan distribusi dan pemanfaatan kartu. Pendidikan dianggap penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan penelitian ini berfokus pada penerapan KIP di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman makna fenomena. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan 11 informan, termasuk staf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, wali murid, dan anak didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian KIP melalui ATM dianggap sangat efektif, dengan implementasi yang berhasil mencakup sosialisasi, distribusi, dan penggunaan dana. Evaluasi terhadap daerah yang telah menjalankan KIP ATM penting untuk menjadi contoh baik bagi daerah lain. Kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan kuota yang menyebabkan pemerataan KIP kurang merata, terutama karena jumlah siswa yang memenuhi syarat sangat banyak. Distribusi dana PIP juga menghadapi kendala terutama terkait minimnya ketersediaan mesin ATM di daerah terpencil. Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi saat mengambil ATM dan buku rekening juga menjadi kendala, terutama bagi siswa yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Penelitian juga ini merekomendasikan bahwa kebijakan KIP perlu diteruskan mengingat manfaat positif yang telah diberikan. Namun, perhatian khusus diperlukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, dan pengawalan yang ketat diperlukan dalam mekanisme pengambilan dan tahapan pengajuan KIP.

## ABSTRACT

Abdullah Fakhil Hilmi Al Huda, 2023, NPM 21901091030, *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Policy Evaluation of the Smart Indonesia Card Program (KIP) in Efforts to Equitable Education (Case Study of Malang District Education Office), Supervisor I: Dr.Sunarivanto, S,sos.,M.M Advisor II: Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si.*

---

*This research is motivated by issues arising in the implementation of the Kartu Indonesia Pintar (KIP) Program in Malang Regency, particularly concerning the distribution and utilization of the cards. Education is considered a crucial means to enhance human quality of life, and this study focuses on the application of the KIP program at the regional level. The research methodology employed is qualitative descriptive with a qualitative approach that emphasizes the understanding of the phenomenon's meaning. Data were obtained through observations, interviews, and documentation involving 11 informants, including staff from the Malang Regency Department of Education, parents of students, and students themselves.*

*The research findings indicate that the distribution of KIP cards via ATMs is perceived as highly effective, with successful implementation covering the stages of socialization, distribution, and fund utilization. Evaluating regions that have successfully implemented the KIP ATM system is essential to serve as a best practice example for other areas. Challenges faced include limited quotas, resulting in uneven distribution of KIP benefits, primarily due to a high number of eligible students. The distribution of PIP funds faces challenges, especially concerning the limited availability of ATMs in remote areas. Additionally, meeting the requirements for obtaining an ATM card and a savings account passbook poses difficulties, particularly for students who struggle to fulfill administrative prerequisites. The study recommends that the KIP policy should be continued due to its positive impacts. However, special attention is needed to address the challenges faced, and rigorous oversight is required throughout the application and submission processes of the KIP program.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sektor strategis yang dalam mendukung pencapaian pembangunan negara, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan publik.

Pentingnya pendidikan di Indonesia sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

Pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Sindhunata (dalam Zahimu, 2019) berawal dari fakta bahwa manusia mempunyai kekurangan, atau dalam bahasanya disebut defisit, karenanya pendidikan merupakan jawaban untuk membuatnya lengkap dan sejalan dengan hal tersebut. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi landasan yang kuat bagi suatu negara dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, seperti persaingan global yang semakin meningkat. Ia memperingatkan negara-negara berkembang untuk lebih memperhatikan kualitas pendidikan mereka dan mengatasi masalah pendidikan, termasuk Indonesia.

Pemberian peringkat negara dengan pendidikan terbaik tahunan 2021 dilakukan oleh *US News and World Report*, *BAV Group*, dan *Wharton School of the University of Pennsylvania*, kegiatan dan penilaian yang dilakukan adalah dengan menyurvei ribuan orang di 78 negara, kemudian memberikan peringkat bagi negara-negara berdasarkan tanggapan survei tersebut. Pada survei tersebut Negara Indonesia masuk pada peringkat 54 (Sumber: Liputan 6.com diakses pada jam 11.45 WIB. 03/11/22).

Pendidikan yang berkualitas merupakan dambaan setiap orang, namun tidak semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas karena kemiskinan. Pendidikan dan kemiskinan saling berkaitan. Visi pendidikan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup setiap orang, membuat setiap orang perlu dididik. Pembiayaan pendidikan telah menjadi isu penting bagi masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mahalnya biaya pendidikan sering kali menjadi kendala bagi masyarakat kecil untuk mengakses pendidikan tinggi. Selain biaya pendidikan, ada juga biaya peralatan yang juga menjadi beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada warganya.

Pendidikan adalah tanggung jawab banyak pihak, bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tapi juga pemerintah, masyarakat, dan terlebih lagi adalah orang tua. Pemerintah bertanggungjawab untuk selalu memperhatikan pemerataan pendidikan dengan berbagai cara sehingga

masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak dan baik tentu-nya.  
(Wawancara, 03/11/22)

Upaya untuk pembangunan manusia melalui pendidikan masih terus ditingkatkan pemerintah. Pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan akses masyarakat miskin/tidak mampu dalam mendapatkan pendidikan. Begitu pula pemerintahan saat ini juga masih fokus untuk memberikan pendidikan yang layak dan merata bagi semua kalangan.

Adanya Kartu Indonesia Pintar merupakan perwujudan dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak November 2014 lalu. PIP sendiri merupakan hasil dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin yang sudah ada sebelumnya.

Kartu Indonesia Pintar tidak hanya diperuntukkan untuk peserta didik jenjang SD-SMA saja. Saat ini sudah ada juga Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka yang diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk pemerataan pendidikan Indonesia. Selain itu, peserta didik yang memiliki kendala dalam hal ekonomi juga akan tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. (Sumber: Fimela.com(diakses pada jam 10.30 WIB. 03/11/22))

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan program memiliki kendala-kendala ataupun masalah yang menghambat program tersebut mencapai sarannya. Masalah yang paling krusial dari sebuah program biasanya tidak tepat sasaran dan menjangkau semua *target*

*group* yang telah ditentukan awalnya. Semenjak program ini diluncurkan banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KIP di Indonesia. Seperti halnya program KIP yang belum dapat menjangkau seluruh anak dari keluarga miskin. Serta banyaknya anggapan masyarakat terkait penyaluran KIP yang masih belum tepat sasaran.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) belum memadai. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan sebagai sumber pengusulan calon penerima tidak handal. Hal ini mengakibatkan penyaluran bantuan untuk PIP belum tepat sasaran dan masih banyak anak yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerima. (Sumber: [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) diakses pada jam 12.30 WIB. 03/11/22)

Adanya fenomena tidak tepat sasaran dari beberapa program pemerintah salah satunya penyaluran PIP ataupun KIP, sehingga dirasa penting dilakukan evaluasi terkait kebijakan penyaluran program tersebut agar dapat diketahui apa saja kendala-kendala yang mengakibatkan program tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Ndraha (2005;102) mengatakan Implementasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta yang terjadi di lapangan dan hasil analisa.

Implementasi dari Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan tentang setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang sama. Adanya pasal tersebut yang membuat pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah yang pendidikan

masyarakat masih rendah karena kekurangan biaya, kurang dalam fasilitas pendidikan yang layak serta masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lain diminta bersama-sama mengawal implementasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah agar tepat sasaran. Kami selalu lakukan sosialisasi dan perbaiki pola penyaluran sehingga siswa yang menerima program tersebut sesuai kriteria yang ditentukan (Wawancara, 04/11/22).

Pemerintah daerah, Kemendikbud ristek, bank penyalur, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mengawal dan terus melakukan evaluasi implementasi PIP Dikdasmen dan KIP Kuliah, sehingga implementasi program tetap akuntabel. PIP Dikdasmen dan KIP Kuliah diharapkan dapat mencegah peserta didik putus sekolah atau putus kuliah, dan menarik siswa yang putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikannya.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi menarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang).

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini maka rumusan masalah yang peneliti susun ialah:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kabupaten Malang?
2. Apakah ada hambatan dalam proses distribusi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ?
3. Bagaimana model distribusi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka peneliti dan menentukan tujuan dari penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
3. Untuk mengetahui, Model Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dibidang Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- b. Sebagai wacana dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema atau hampir sama dengan penelitian ini

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi, diharapkan menjadi masukan untuk instansi terkait dalam mengembangkan berbagai inovasi dalam implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sebagai informasi mengenai implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas dan mengetahui terutama dalam hal-hal implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendistribusian KIP melalui ATM di kabupaten Malang dinilai sangat efektif terbukti implementasinya terlaksana dengan baik dari tahapan sosialisasi, distribusi dan pemanfaatan dana, sehingga dapat mencapai sasaran yang direncanakan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), diantaranya; keterbatasan kuota penerima manfaat, yang menyebabkan belum semua siswa kurang mampu dapat diakomodasi. Selain itu, dalam konteks pendistribusiannya, terdapat masalah minimnya ketersediaan mesin ATM terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Dalam proses pencairan dana KIP dengan Skema buku rekening/ATM juga ditemukan kendala administrasi yang harus dipenuhi penerima manfaat saat mengambil ATM dan buku rekening dari bank.

Adapun model Distribusi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kabupaten Malang, Pertama; Identifikasi Penerima: Proses dimulai dengan mengidentifikasi siswa-siswa yang memenuhi kriteria untuk menerima KIP. Kriteria ini biasanya berdasarkan pada tingkat pendapatan keluarga atau faktor lainnya yang ditentukan oleh pemerintah. Kedua, Pengajuan Permohonan: Calon penerima atau keluarga mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIP. Mereka biasanya harus melengkapi formulir dan mengumpulkan dokumen

yang diperlukan. Ketiga, Verifikasi Data: Pihak berwenang melakukan verifikasi data yang diajukan oleh calon penerima untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan. Keempat, Distribusi dana KIP yang diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat. Distribusi ini dapat dilakukan melalui sekolah atau perorangan.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah:

1. Kebijakan ini perlu dilanjutkan mengingat hasil yang dilaksanakan memberikan manfaat positif yang dirasakan berbagai pihak. Namun demikian proses *update* pendataan dan sinkronisasi data harus terus dilakukan agar seluruh siswa miskin yang memang berhak, terutama siswa dari yatim piatu yang tinggal di panti-panti asuhan dapat menerima dana PIP.
2. Pencairan dana KIP ATM umumnya dianggap mudah dan cepat, terutama siswa SMP, SMA/ SMK dan Paket B dan Paket C sudah dapat menggunakan sendiri ATM-nya untuk mengambil uang. Namun untuk anak-anak SD dan beberapa anak SMP sebaiknya perlu dibantu orang tuanya/ sekolah untuk mencairkan dana.
3. Kebijakan dengan menggunakan KIP ATM segera diberlakukan secara keseluruhan, karena model KIP ATM dinilai lebih praktis, tanpa prosedur pencairan yang rumit, kepala sekolah tidak

direpotkan, siswa dapat mengambil dana secara utuh, sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.

4. Pembinaan dari sekolah/dinas/pemerintah kepada siswa/orang tua penerima yang sudah berjalan harus terus dilaksanakan mengingat ini bagian dari sistem pengawasan/monitor yang proporsional terhadap pemanfaatan dana PIP untuk mencegah penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya melalui pembinaan sekolah.
5. Pemerintah daerah/Bank Penyalur/Sekolah yang mempunyai potensi perlu mulai membangun kerja sama dengan tempat perbelanjaan baik itu toko dan koperasi sekolah atau *merchant* yang mempunyai fasilitas EDC ataupun yang belum agar siswa dapat berbelanja sesuai dengan peruntukannya. Diperlukan kemauan dan inovasi dari pimpinan sekolah, lembaga perbankan dan *stakeholder* daerah dalam menyukseskan implementasi KIP ATM.



## DAFTAR RUJUKAN

- Creswell. (2016). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. In Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mauliana Sari, Sri Musdalifah, E. A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone 1Mauliana. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v8i1.422>
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widhiarsana.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ( PIP ) Melalui Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Solichin, Abdul Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supeno, Hadi. (1999). *Pendidikan dalam Belunggu Kekuasaan*. Magelang: Pustaka Paramedia.
- Mauliana Sari, Sri Musdalifah, E. A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone 1Mauliana. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v8i1.422>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ( PIP ) Melalui Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.

*Administration Review*, 2(1), 193–204.

SARTIKA. (2018). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros ( dibimbing oleh Musliha Karim dan Muhammad Tahir ). *ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR*.

Verto, S. (2017). *Evaluasi Implementasi Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Bagi Siswa Kurang Mampu (Studi pada SDN Jrebeng Wetan Tahun 2016)* Verto. 52–56.

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>

Zahimu, H. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v2i1.469>

SA, Luvia Intan, dkk. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Desa." *Ji\_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)* 10.2 (2019).

Supriyanto, Didik. "Quality of Public Services In Service Office Population and Civil Registration." *Best Journal of Administration and Management* 1.3 (2023): 118-122.

